

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diartikan selaku sekelompok prinsip, standar, serta prosedur akuntansi yang dirancang khusus guna mengelola penyusunan serta penyajian laporan finansial entitas pemerintahan. SAP diartikan selaku sistem kerja yang diterapkan pemerintah guna memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan, termasuk kriteria keakuratan, keandalan, dan relevansi (Chodijah, S., & Hidayah, N. 2018). Namun, untuk memahami SAP secara lebih mendalam, perlu dijabarkan dari konsep umum ke khusus. SAP bertujuan agar memperoleh data keuangan yang berkualitas bagi entitas pemerintahan.

Berdasarkan “PP No. 71 Tahun 2010”, Pemerintah menerapkan SAP yang berbasiskan akrual. SAP berbasiskan akrual tersebut dituangkan didalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). PSAP merupakan SAP yang mencakup judul, nomor, serta tanggal efektif. SAP lampiran I yang berbasiskan akrual mengacu pada PSAP serta Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Pengendalian internal merupakan rangkaian kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi untuk memastikan keandalan dan ketepatan informasi keuangan, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan mencapai tujuan

operasional dengan cara efektif dan efisien. Pengendalian internal melakukan peranan krusial dalam menjaga integritas laporan keuangan, mencegah dan mendeteksi penipuan, serta memastikan bahwa sumber daya digunakan secara bertanggung jawab.

Sistem pengendalian internal mencakup beberapa komponen utama, yakni lingkungan pengendalian, penilaian terhadap risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi atau informasi, serta pengawasan. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana organisasi yang mendukung penerapan pengendalian internal yang efektif. Hal ini melibatkan tanggung jawab manajemen pada integritas dan etika, struktur organisasi yang sesuai, serta kebijakan dan prosedur yang mendukung praktik pengendalian yang efektif dalam Penilaian Risiko merupakan proses mengidentifikasi serta menganalisis risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi.

DKI Jakarta secara kontinu menilai risiko yang terkait dengan pelaporan keuangan dan operasionalnya, serta mengembangkan strategi untuk mengelola risiko tersebut. Hal ini termasuk risiko yang timbul dari perubahan lingkungan eksternal, kompleksitas operasi, dan teknologi informasi. Aktivitas pengendalian mencakup tindakan dan kebijakan yang ditetapkan untuk mengatasi risiko yang diidentifikasi. Khususnya di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum serta HAM, yang sudah menerapkan pengawasan internal yang mencakup pembagian tugas, persetujuan transaksi, pengamanan aset, serta penyatuan kembali.

Pemisahan tugas adalah prinsip dasar yang memastikan bahwa tidak ada satu individu yang memiliki kontrol penuh atas seluruh aspek transaksi keuangan, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan penipuan. Otorisasi transaksi

menjamin bahwasanya setiap transaksi sudah mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang sebelum diproses. Pengamanan aset melibatkan tindakan untuk melindungi aset fisik dan informasi dari pencurian, kerusakan, atau penyalahgunaan. Rekonsiliasi adalah proses perbandingan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi catatan keuangan.

Informasi dan komunikasi adalah komponen penting lainnya dalam pengendalian internal. Hal ini melibatkan penyediaan informasi yang tepat waktu dan relevan kepada pihak yang membutuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM harus memastikan bahwa informasi keuangan disampaikan secara efektif kepada manajemen, dewan, dan pemangku kepentingan lainnya. Komunikasi yang baik juga mencakup umpan balik dari bawah ke atas tentang masalah yang dihadapi dan saran untuk perbaikan (Mentu, E. P., & Sondakh, J. J. 2016).

Pemantauan adalah proses peninjauan dan evaluasi berkelanjutan atas efektivitas pengendalian internal. Di Inspektorat Kementerian, pemantauan dilakukan melalui audit internal dan eksternal, serta peninjauan manajemen secara berkala. Audit internal bertugas guna mengevaluasi ketaatan pada kebijakan dan prosedur, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, dan merekomendasikan perbaikan. Audit eksternal yang dilakukan oleh auditor independen, mengajukan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan dengan keseluruhan. Manajemen harus secara berkala meninjau hasil pemantauan dan mengambil tindakan perbaikan jika ditemukan kelemahan atau penyimpangan.

Efektivitas sistem pengendalian internal sangat dibutuhkan untuk menjamin bahwasanya informasi keuangan yang disampaikan tepat dan bisa diandalkan. Hal tersebut mendukung keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, yang akhirnya menumbuhkan rasa percaya masyarakat terkait dengan pemerintahan daerah. Tindakan perbaikan yang diambil jika ditemukan kelemahan juga menunjukkan komitmen terhadap peningkatan berkelanjutan dan pengelolaan risiko yang proaktif.

Jika audit internal menemukan bahwa ada ketidaksesuaian dalam prosedur pemisahan tugas, maka harus segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut dan memastikan bahwa tugas-tugas yang sensitif dipisahkan dengan baik. Jika ditemukan kelemahan dalam otorisasi transaksi, langkah-langkah harus diambil untuk memperketat kontrol otorisasi dan memastikan bahwa semua transaksi disetujui oleh pihak yang berwenang. Pemantauan terus-menerus dan respons cepat terhadap temuan audit adalah kunci untuk menjaga efektivitas pengendalian internal.

SAP tujuannya agar memperbaiki transparansi, akuntabilitas, serta keahlian laporan keuangan pemerintahan dengan menyediakan kerangka kerja yang konsisten dan standar yang berlaku umum (Safitri, D. 2017). Evaluasi ini tidak hanya melibatkan penilaian terhadap kesesuaian teknis, tetapi juga melihat dampak keseluruhan pada kualitas informasi keuangan yang disajikan kepada para pemangku kepentingan. SAP berbasiskan akrual mengharuskan pengakuan pendapatan dan beban saat terjadinya transaksi ekonomi, bukan hanya saat kas diterima atau dibayarkan. Pendekatan ini meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan karena mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dari entitas pemerintah (Nur Hayadi & Iin Rosini, 2019).

Salah satu aspek yang dianalisis adalah pengakuan pendapatan serta beban. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM harus mengakui pendapatan dari beragam referensi, seperti pajak daerah, retribusi, hibah, dan pendapatan investasi, ketika transaksi tersebut terjadi. Contohnya, pajak daerah diakui sebagai pendapatan ketika wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak tersebut, bukan hanya saat pajak tersebut diterima. Demikian pula, beban operasional dan beban investasi harus diakui pada saat terjadinya kewajiban atau pengeluaran, bukan hanya saat pembayaran dilakukan.

Penerapan prinsip ini membantu memastikan bahwasanya laporan keuangan menggambarkan situasi keuangan yang sesungguhnya serta memaparkan informasi yang tepat dan relevan kepada pihak yang berkepentingan. Analisis ini mencakup pengukuran aset dan utang. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM mempunyai beragam jenis aset, termasuk aset tetap seperti tanah, bangunan, dan infrastruktur, serta aset lancar seperti kas dan piutang. Penilaian nilai aset ini harus dilaksanakan melalui cara yang konsisten dan mengikuti aturan yang ditentukan SAP, seperti nilai wajar, nilai penggantian, atau nilai terpulihkan (Ningtyas, P. E., & Widyawati, D. 2015).

Dilansir dari bpk.go.id adanya urgensi SAP Provinsi DKI Jakarta dinilai berdasarkan pada adanya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) menyoroti beberapa masalah dari laporan keuangan tahun 2024. Bapak I Nyoman Adhi Suryadnyana selaku anggota Badan Pemeriksa Keuangan mengidentifikasi

penemuan kekurangan pada sistem pengendalian internal (SPI) dan pelanggaran pada ketentuan hukum yang berlaku harus ditindaklanjuti dan memerlukan perbaikan oleh Inspektora Jenderal Kemenkumham.

Kelemahan dalam SPI dan pelanggaran antara lain disebabkan oleh pembebeanan belanja barang dan belanja modal yang tidak sesuai. Ada 12 pekerjaan yang penyelesaian harus tertunda juga belum terkena denda, dan pembayaran lebih 22 pekerjaan belanja barang dan 29 pekerjaan belanja modal. Untuk menindaklanjuti kelebihan pembayaran serta kekurangan penerimaan negara, Kemenkumham bersama pihak terlibat sudah melaksanakan penyetoran ke Kas Negara.

Pemilihan Inspektorat Jenderal Kemenkumham didasarkan pada beberapa temuan isu BPK seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Hal ini dimungkinkan perlunya penerapan SAP dalam upaya pencegahan terhadap adanya ketidakwajaran dana dan transparansi yang buruk dari instansi pemerintah. Penelitian juga didasari adanya kasus yang terjadi 5 tahun ke belakang untuk memastikan kebaruan skripsi.

Pengukuran utang harus dilakukan dengan memperhitungkan nilai kini dari arus kas yang diantisipasi supaya melunasi kewajiban tersebut. Utang jangka panjang seperti pinjaman atau obligasi harus diukur berdasarkan nilai saat ini berdasarkan pembayaran bunga dan pokok yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Penilaian yang akurat terhadap aset dan utang ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan Inspektorat Jenderal Kemenkumham. Pengungkapan informasi keuangan merupakan elemen penting lainnya dalam analisis ini. Laporan keuangan

Inspektorat Jenderal Kemenkumham harus mencakup penyajian yang lengkap dan relevan dari neraca, laporan penghasilan serta kerugian, laporan aliran kas, serta catatan terkait laporan finansial.

Pengungkapan yang baik harus menyediakan informasi tambahan yang membantu pihak yang menggunakan laporan keuangan agar mengetahui kondisi keuangan dan kinerja operasional entitas. Keterangan mengenai laporan keuangan harus mengungkapkan kesepakatan akuntansi yang diterapkan, estimasi yang signifikan, serta rincian transaksi yang tidak biasa. Pengungkapan yang lengkap dan transparan ini membantu mengoptimalkan keyakinan para pemangku kepentingan pada informasi keuangan yang dipaparkan. Berlandaskan latar belakang ini, peneliti berminat menyelenggarakan penelitian terkait **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam laporan keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan, rumusan masalah di penelitian ini ialah seperti dibawah :

1. Sejauh mana penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM?
2. Bagaimana kesesuaian penyajian laporan keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)?

C. Tujuan

Adapun Tujuan yang ini dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui analisis SAP dan kualitas pada laporan keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
2. Mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Dapat mengetahui hasil dari transparansi dan penerapan SAP pada Laporan keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
2. Hasil penelitian ini dapat membantu Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.
3. Dapat menjadi rekomendasi bagi pihak Pemerintah daerah dalam melakukan peningkatan kualitas pelayanan sistem SAP guna tercapainya tingkat kepuasan pengguna sistem SAP kedepannya.

E. Batasan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan hanya terdapat pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dengan tenggang waktu tahun 2024. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya ialah pada 2017 dengan tajuk “Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM = *Implementation analysis of accrual based governmental accounting standard in Inspectorate General Ministry of Law and Human Rights*” yang disusun oleh Tia Setiawati Perbedaan dengan

penelitian yang akan dibuat adalah penelitian sebelumnya fokus SAP berbasis akrual. Pada penelitian ini terdapat batasan penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada PSAP 01 terkait pemaparan laporan keuangan.

